

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Pohan (2007:42) kajian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.

2.1.1 Review Penelitian Sejenis

Sebelum melakukan penelitian mengenai Pola Komunikasi Bidang P2KB Pemerintahan Kota Cimahi Terkait Pemahaman *Stunting* Pada Calon Pengantin Di Kota Cimahi, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian sejenis dan terkait yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini:

- 1) Yudi Kurniawan, Universitas Lampung, 2016. Dengan judul skripsi “Analisis Pola Komunikasi Formal Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola komunikasi formal dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi formal di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah baik diterapkan pada berbagai jenis komunikasi, termasuk *horizontal*, *downward*, *upward*, dan *diagonal communication*. Hasilnya menegaskan bahwa *horizontal communication* menjadi pola

komunikasi yang paling efektif dalam faktor-faktor seperti motivasi, pengetahuan, peran, dan keterampilan dalam memberikan dukungan yang kuat untuk peningkatan kinerja pegawai.

- 2) Amelia Andila Putri, Universitas Lampung, 2023. Dengan judul skripsi “Peran Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Dalam Membangun Desa Anti *Stunting*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan aktor, bentuk program dan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats* (SWOT) pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*. Hasil dari penelitian ini adalah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Cipadang telah berhasil menerapkan teori peran Jim Ife dan Soejono Soekanto dalam menjalankan tugas sesuai surat keputusan dan juga didorong oleh solidaritas serta empati antar anggota. Program penurunan *stunting* dijalankan dengan sistem kerja terstruktur sehingga hasil penelitian menunjukkan terdapatnya penurunan angka *stunting* dengan jumlah 34 anak menjadi 25 anak pada Februari 2023.
- 3) Adjeng Putri Koapaha dengan judul penelitian “Peranan Komunikasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah peranan komunikasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan bengkol kecamatan mapanget kota Manado belum terlalu baik, hal ini dikarenakan pemerintah belum memanfaatkan secara optimal proses dan bentuk komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Sehingga seringkali masih terkesan lambat dalam pelayanan administrasi.

Tabel 2.1 *Review Penelitian Sejenis*

No.	Peneliti	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Yudi Kurniawan	Analisis Pola Komunikasi Formal Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung	Kualitatif	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti terkait pola komunikasi	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pola komunikasi yang di teliti dalam penelitian terdahulu merupakan pola komunikasi formal sedangkan pola komunikasi yang di teliti oleh peneliti merupakan pola komunikasi pemerintahan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi formal di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah baik diterapkan pada berbagai jenis komunikasi, termasuk <i>horizontal, downward, upward, dan diagonal communication</i> . Hasilnya menegaskan bahwa <i>horizontal communication</i> menjadi pola komunikasi yang paling efektif dalam faktor-faktor seperti motivasi, pengetahuan, peran, dan keterampilan dalam memberikan dukungan yang kuat untuk peningkatan kinerja pegawai.

2	Amelia Andila Putri	Peran Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Desa Dalam Membangun Desa Anti <i>Stunting</i>	Kualitatif	Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas sama yaitu terkait <i>stunting</i>	Perbedaan dari penelitian ini terdapat di fokus penelitian yaitu penelitian terdahulu terfokus dalam membahas peran percepatan penurunan <i>stunting</i> sedangkan dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti terfokus pada pola komunikasi yang di gunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan pemahaman terkait <i>stunting</i>	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Desa Cipadang telah berhasil menerapkan teori peran Jim Iff dan Soejono Soekanto dalam menjalankan tugas sesuai surat keputusan dan juga didorong oleh solidaritas serta empati antar anggota. Program penurunan <i>stunting</i> dijalankan dengan sistem kerja terstruktur sehingga hasil penelitian menunjukkan terdapatnya penurunan angka <i>stunting</i> dengan jumlah 34 anak menjadi 25 anak pada Februari 2023.
---	------------------------	---	------------	--	---	--

3	Adjeng Putri Koapaha	Peranan Komunikasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kualitatif	Persamaan dari penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti komunikasi pemerintah	Perbedaan dari penelitian ini adalah bentuk dari karya tulis ilmiahnya adalah jurnal sedangkan bentuk dari karya tulis ilmiah yang peneliti lakukan adalah skripsi. Selain itu, dalam penelitian terdahulu terfokus pada pembahasan peranan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan, sedangkan pada penelitian yang di lakukan oleh peneliti lebih terfokus pada pembahasan pola komunikasi dalam meningkatkan pemahaman	Peranan komunikasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan bengkol kecamatan mapanget kota Manado belum terlalu baik, hal ini dikarenakan pemerintah belum memanfaatkan secara optimal proses dan bentuk komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Sehingga seringkali masih terkesan lambat dalam pelayanan administrasi.
---	----------------------------	--	------------	---	---	---

2.1.2 Kerangka Konseptual

2.1.2.1 Pola Komunikasi

2.1.2.1.1 Pengertian Pola Komunikasi

Menurut Maimun (2017:213), pola adalah suatu sistem, cara kerja, ataupun bentuk dari segi kegiatan. Dengan kata lain, pola adalah suatu bentuk atau model yang memiliki pengulangan secara teratur, baik itu dalam bentuk desain ataupun bentuk gagasan.

Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi antara satu pihak dengan pihak lainnya secara saling berhubungan. Secara *etimologis* komunikasi berasal dari bahasa latin “*communicatio*” yang artinya pergaulan, peran, dan kerjasama yang bersumber dari istilah “*communis*” yang artinya sama makna (Effendy, 1986: 60). Menurut Everett M Rogers dan Lawrence Kincaid dalam buku *Communication Network: Toward a New Paradigm for Research* (1981) menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.

Pola komunikasi mengacu pada struktur atau kerangka yang mengatur bagaimana pesan atau informasi disampaikan, diterima, dan diinterpretasikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Menurut Djamarah (2004:1) pola komunikasi dapat di artikan sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan menurut Effendy (dalam Gunawan2013:225) pola komunikasi adalah suatu proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan dari keterpautannya unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pola komunikasi merupakan pola atau struktur yang mengorganisir bagaimana komunikasi dilakukan, termasuk cara pesan disusun, cara penyampaian, dan cara penerimaan pesan. Pola ini penting untuk memahami dinamika komunikasi antarindividu atau dalam kelompok, serta untuk memastikan pesan yang disampaikan mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

2.1.2.1.2 Model Pola Komunikasi

Pola komunikasi terdiri atas empat model, antara lain adalah:

1. Pola Komunikasi Linear

Proses komunikasi ini berasal dari kata linear yang artinya lurus. Pola komunikasi linear merupakan bentuk penyampaian pesan dari satu titik awal (komunikator) yang diteruskan hingga ke titik akhir (komunikan) secara lurus.

2. Pola Komunikasi Sirkular

Proses komunikasi ini berasal dari kata *circural* yang artinya melingkar. Pola komunikasi sirkular merupakan pesan yang disampaikan dari titik awal dan akan kembali ke titik awal. Dalam konteks komunikasi yang dimaksudkan disini adalah terjadinya feedback atau umpan balik sebagai bentuk konfirmasi bahwa seluruh komunikan sudah mendapatkan informasi dari komunikator, oleh karena itu ada kalanya umpan balik tersebut mengalir dari komunikan ke komunikator sebagai bentuk tanggapan komunikasi terhadap pesan yang ia terima dari komunikator.

3. Pola Komunikasi Primer

Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian oleh komunikator pada komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Terdapat dua lambang dalam pola komunikasi ini, yaitu lambang verbal (bahasa) dan lambang nonverbal (isyarat dengan menggunakan anggota tubuh antara lain mata, kepala, bibir, tangan dan lain sebagainya).

4. Pola Komunikasi Sekunder

Pola komunikasi sekunder adalah proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Penggunaan media biasanya didasari pertimbangan jarak yang jauh maupun audiens yang terbilang banyak.

2.1.2.2 Pemerintahan Kota

2.1.2.2.1 Pengertian Pemerintahan Kota

Menurut Wilson (1903:572), Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang memberikan perhatian urusan publik. Menurut Suradinata, Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut Affan, Pemerintah adalah kegiatan terorganisir orang / warga di wilayah negara berdasarkan atas dasar kedaulatan negara dan bersumber untuk mencapai tujuan dari orang / warga di daerah itu sendiri. H Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan Antara Instansi Pemerintah” mendefinisikan pemerintah dengan “Istilah ini berasal dari Pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah”. (Pranadjaja, 2003:24).

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi negara dengan kekuatan kekuasaan yang besar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran bersama suatu warga negara dengan hal-hal yang memberikan perhatian terhadap publik.

Menurut Burkhad Hofmeister, kota adalah sebuah pemusatan keruangan mulai dari tempat tinggal, tempat kerja bagi manusia itu sendiri, hingga kegiatan umum. Dalam hal ini, kegiatan umum dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor sekunder berupa industri dan perdagangan serta sektor tersier yang berupa jasa dan pelayanan masyarakat. Selain itu Hofmeister juga mengatakan bahwa pertumbuhan yang terjadi di pemusatan keruangan terjadi karena adanya pendatang yang memiliki kemampuan untuk melayani atau memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi wilayah yang letaknya jauh. Menurut Bintarto kota adalah sebuah kesatuan bagi kehidupan manusia yang diberi tanda dengan hadirnya kepadatan penduduk yang sangat tinggi serta ditandai dengan adanya strata ekonomi yang heterogen bercorak materialistis. Bintarto juga mengungkapkan bahwa penduduk yang ada di kota terdiri dari penduduk asli dari wilayah tersebut dan penduduk yang datang dari wilayah lain. Bintarto juga menjelaskan bahwa masyarakat kota adalah kumpulan individu yang heterogen, baik itu dari hal pekerjaan, adat, kebudayaan, dan agama.

Dapat disimpulkan bahwa kota merupakan sebuah tempat pemusatan kegiatan bagi sekelompok manusia. Di dalam sebuah kota, terdapat tempat tinggal, tempat kerja, hingga kegiatan umum bagi manusia itu sendiri dan biasanya memiliki beberapa gedung tinggi. Hal tersebut merupakan sebuah indikasi sebuah daerah bisa dikatakan sebagai kota.

Pemerintahan kota terdiri dari dua kata yang memiliki arti tersendiri. Pada dasarnya, pemerintahan kota adalah suatu organisasi ataupun komunitas dari sekelompok penduduk suatu wilayah untuk mengelola wilayah itu sendiri. Dalam Undang Undang Negara Indonesia, pengertian kota berlaku untuk "Desa". Berdasarkan Undang Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu , Pemerintahan kota adalah sistem administrasi dan pengaturan yang

bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan dan kegiatan pemerintahan di tingkat lokal dalam suatu kota. Definisi tersebut mencerminkan peran penting pemerintahan kota dalam menyediakan layanan publik, menjaga ketertiban, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat lokal.

2.1.2.2 Fungsi Pemerintahan Kota

Dalam suatu kota, pemerintahan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat. Pemerintah dapat mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berlangsung di suatu wilayah termasuk penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban umum, dan penanggulangan kejahatan agar kedamaian dan ketertiban di dalam wilayah tersebut tetap terjalin. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, fungsi pemerintahan kota di atur dengan:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Fungsi-fungsi tersebut membantu pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal serta menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan wilayahnya.

2.1.2.3 Komunikasi Pemerintahan

2.1.2.3.1 Pengertian Komunikasi Pemerintahan

Dikuitp dari <https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-pemerintahan>, Erliana Hasan (2005) menyatakan bahwa komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.

María José Canel dan Karen Sanders dalam *Government Communication: An Emerging Field in Political Communication Research* (2011: 85-86) mengutip *Government communication refers to the aims, role and practice of communication implemented by executive politicians and officials of public institutions in the service of a political rationale, and that are themselves constituted on the basis of the people's indirect or direct consent and are charged to enact their will*. Hal ini memiliki pengertian bahwa komunikasi pemerintahan mengacu pada tujuan, peran dan praktek komunikasi yang dilaksanakan oleh politisi eksekutif dan pejabat dari lembaga-lembaga publik lainnya dalam kerangka pelayanan pemikiran politik.

Strömbäck and Kioussis (2011) dalam Canel dan Sanders melalui *Introduction: Mapping the Fields of Government Communication* (2013 : 4) : *Mereka mendefinisikan komunikasi pemerintahan dalam kerangka political public relations. Political public relations is the management process by which an organization or individual actor for political purposes, through purposeful communication and action, seeks to influence and to establish, build, and maintain beneficial relationships and reputations with its key publics to help support its mission and achieve its goals.*

Public relations politik adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu untuk tujuan politik, melalui komunikasi serta tindakan yang memiliki tujuan, untuk mempengaruhi dan untuk melepaskan, membangun, dan mengelola hubungan yang menguntungkan dan reputasi dengan publik untuk mendukung misi dan mencapai tujuan yang dimiliki.

2.1.2.3.2 Strategi Komunikasi Pemerintahan

Setiap kegiatan komunikasi harus berdasarkan rencana atau strategi komunikasi yang terdiri dari elemen-elemen dasar yaitu:

- 1) Menentukan tujuan komunikasi.
- 2) Menentukan target komunikasi.
- 3) Menentukan pesan yang akan disampaikan.
- 4) Menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai efek yang maksimum.
- 5) Menentukan metode dan media yang akan digunakan.
- 6) Menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target sasaran.

Dari rencana dasar tersebut, dikembangkan menjadi beberapa tahapan pengembangan perencanaan komunikasi yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Menganalisis masalah.
- 2) Menyusun peran yang akan dimainkan oleh komunikasi.
- 3) Mengidentifikasi target sasaran.
- 4) Mengidentifikasi tujuan komunikasi.
- 5) Mengidentifikasi strategi atau pesan.
- 6) Mengidentifikasi alat-alat komunikasi.
- 7) Pendanaan kegiatan komunikasi.
- 8) Mengorganisasi kegiatan komunikasi.
- 9) Perencanaan.
- 10) Melakukan evaluasi.

2.1.2.3.3 Prinsip-prinsip Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan memiliki beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Keterbukaan.
- 2) Komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung.

- 3) Keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman.
- 4) Presentasi positif dari kebijakan pemerintah dan prestasi yang telah dicapai.
- 5) Menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional.
- 6) Melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan.
- 7) Mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah.

Sementara itu, menurut Joel Netshitenzhe dalam *Government Communicators' Handbook* menyatakan bahwa prinsi-prinsip dasar komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Kerja pemerintah adalah sebuah kegiatan publik.
- 2) Sebuah pusat layanan komunikasi harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan publik tersebut.
- 3) Para pejabat politik adalah komunikator utama dalam komunikasi pemerintahan.
- 4) Setiap orang dalam pemerintahan adalah seorang komunikator.
- 5) Komunikasi pemerintahan harus didasarkan pada program dan strategi komunikasi yang terpadu.
- 6) Struktur komunikasi tidaklah mencerminkan kebijakan.
- 7) Komunikasi lebih dari sekedar media perantara.
- 8) Bentuk komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi langsung dan pertukaran bersama mengenai suatu pandangan dengan publik.
- 9) Dalam mengerjakan kampanye dan program, diperlukan usaha untuk memahami lingkungan komunikasi.
- 10) Kampanye komunikasi dapat berjalan dengan baik ketika bekerja sama dengan pihak lain di luar pemerintah.

2.1.2.3.4 Fungsi Komunikasi Pemerintahan

Berbagai fungsi komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kepada publik.
- 2) Menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan.
- 3) Mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab.
- 4) Memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara.

2.1.2.3.5 Hambatan Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan tidak luput dari berbagai hambatan. Simon, Smithburg, dan Thomson dalam *Handbook of Administrative Communication* menyebutkan hambatan-hambatan komunikasi pemerintahan, yaitu hambatan bahasa, kerangka referensi, jarak status, jarak geografis, perlindungan diri dari inisiator, tekanan pekerjaan lainnya, dan pembatasan yang disengaja pada komunikasi.

- 1) Hambatan bahasa – Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan tidak dipahami oleh penerima pesan dapat menghambat komunikasi.
- 2) Kerangka referensi – Setiap orang memiliki kerangka referensi yang berbeda dan dapat mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan.
- 3) Jarak status – Hal ini berhubungan dengan hambatan dalam pola komunikasi organisasi yang dianut oleh organisasi pemerintahan.
- 4) Jarak geografis – Jarak geografis yang sangat lebar antara pemerintah dan warga Negara dapat menghambat komunikasi pemerintahan.
- 5) Perlindungan diri dari inisiator – Berkaitan dengan kesediaan penerimaan pesan yang dilakukan oleh penerima pesan.

- 6) Tekanan pekerjaan lainnya – Tekanan pekerjaan yang dialami dapat menyebabkan hilang prioritas terhadap pengiriman dan penerimaan pesan.
- 7) Pembatasan yang disengaja pada komunikasi – Berkaitan dengan sensor yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengiriman dan penerimaan pesan.

2.1.2.4 Stunting

2.1.2.4.1 Pengertian *Stunting*

Dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-stunting>, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021, yang dimaksud dengan *stunting* adalah gangguan tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi yang berulang. Gangguan ini ditandai dengan tinggi badan yang berada di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan, *stunting* dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah *stunted*, yakni anak balita dengan nilai *z-score* kurang dari -2.00 Standar Deviasi. Sedangkan yang kedua adalah *severely stunted* atau anak yang *z-score*-nya kurang dari -3.00 Standar Deviasi.

Dengan kata lain, *stunting* adalah gangguan pertumbuhan pada balita sehingga perkembangan anak tidak sesuai (lebih pendek) dengan standar dan dapat menimbulkan dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.2.4.2 Faktor Penyebab *Stunting*

Stunting dapat diakibatkan oleh banyak faktor yang terjadi pada masa pertumbuhan balita, diantaranya seperti:

- 1) Kemiskinan. Keluarga pendapatan rendah memiliki akses dengan terbatas anak-anak gizi yang terhadap makanan bergizi, sehingga mereka tidak mendapatkan asupan cukup.

- 2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi yang baik. Praktik pemberian makanan yang tidak tepat berkontribusi pada gizi buruk pada anak. Akibatnya, anak-anak tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan baik.
- 3) Kondisi sanitasi dan lingkungan memiliki peran penting. Infeksi dan penyakit, seperti diare dan penyakit parasit, dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi dan pertumbuhan anak. Sanitasi yang buruk dan akses terbatas terhadap air bersih serta fasilitas sanitasi yang memadai juga berkontribusi pada masalah *stunting*.
- 4) Akses terbatas ke pelayanan kesehatan.
- 5) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan gizi rutin juga mempengaruhi upaya pencegahan dan penanganan gizi buruk.

2.1.2.4.3 Dampak *Stunting*

Stunting pada anak dapat mempengaruhi seluruh pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam jangka pendek, dampak dari *stunting* terdiri dari perkembangan otak yang terganggu, gangguan metabolisme, kecerdasan, serta pertumbuhan fisiknya.

Sementara itu, dalam jangka yang panjang *stunting* yang tidak ditangani dengan baik sejak awal dapat menyebabkan berbagai dampak, di antaranya:

- 1) Membuat kemampuan perkembangan kognitif otak menurun
- 2) Anak mudah terserang penyakit karena kekebalan tubuhnya lemah
- 3) Anak lebih berisiko terkena penyakit metabolik, seperti kegemukan.
- 4) Anak menjadi kesulitan belajar
- 5) Penyakit jantung dan pembuluh darah

- 6) Saat sudah dewasa, anak bertubuh pendek akan sulit bersaing di dunia kerja dan tingkat produktivitasnya cenderung rendah
- 7) Pada anak perempuan, saat dewasa stunting dapat menimbulkan masalah kesehatan serta perkembangan pada keturunannya. Ini biasanya terjadi pada wanita dewasa yang tinggi badannya kurang dari 145 cm.
- 8) Ibu hamil yang tinggi badannya di bawah rata-rata akan mengalami perlambatan pertumbuhan rahim, plasenta dan perlambatan aliran darah ke janin.
- 9) Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tinggi badannya di bawah rata-rata lebih beresiko terkena komplikasi medis yang serius. Seperti pertumbuhan yang terhambat serta perkembangan saraf dan kemampuan intelektualnya terhambat. Kondisi ini terus berlangsung hingga si anak tersebut memiliki keturunannya sendiri.

2.1.2.5 Calon Pengantin

2.1.2.5.1 Pengertian Calon Pengantin

Menurut Kemenkes RI (2018) calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama ataupun Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi datadata yang diperlukan untuk pernikahan (Depag surabaya, 2010).

CATIN atau Calon Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada wanita usia subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat serta Calon Pengantin laki-laki yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya (KBBI, 2019).

Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah (Mia fatmawati, 2016).

2.1.2.5.2 Calon Pengantin Berisiko Melahirkan Anak *Stunting*

Dikutip dari <https://genbest.id/articles/calon-pengantin-seperti-ini-berisiko-melahirkan-anak-stunting>, banyak faktor yang menyebabkan *stunting*, salah satunya kekurangan gizi sebelum maupun saat memasuki masa kehamilan. Itulah mengapa, seluruh calon pengantin wajib menjaga kesehatan dan memastikan status gizi normal sebelum menikah sehingga anak yang dilahirkan sehat dan tidak *stunting*.

Di bawah ini adalah beberapa tanda calon pengantin wanita yang memiliki status gizi buruk sebelum menikah:

1) Mempunyai IMT yang tidak ideal

Calon pengantin wanita harus memastikan indeks massa tubuh (IMT) normal yaitu memiliki berat badan ideal sebelum menikah. Sebab, kelebihan maupun kekurangan berat badan berisiko menimbulkan berbagai masalah saat masa kehamilan. Jika terlalu kurus dikhawatirkan bayi mengalami BBLR (berat badan lahir rendah) akibat tidak terpenuhinya gizi janin selama di kandungan. Sedangkan jika terlalu gemuk dapat menurunkan kesuburan.

2) Hasil pengukuran LILA tidak normal

Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) bertujuan untuk mengetahui risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) atau kekurangan gizi berkepanjangan pada calon pengantin wanita. Itulah mengapa, calon pengantin wanita disarankan memiliki ukuran LILA normal sebelum menikah. Idealnya, calon

pengantin wanita harus memiliki LILA di atas 23,5 cm. LILA di bawah normal menjadi indikator calon pengantin kekurangan gizi parah, sehingga mengakibatkan kehamilan yang berisiko.

3) Tidak terpenuhi kebutuhan zat besinya

Ibu hamil yang menderita anemia parah berisiko melahirkan anak *stunting*. Untuk mencegah anemia, calon pengantin wanita harus mengonsumsi makanan sumber protein, sumber zat besi seperti sayuran hijau, serta bila diperlukan, minum Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin.

4) Termasuk kategori 4T

calon pengantin wanita juga harus menghindari 4T agar tidak melahirkan anak *stunting*. Yang dimaksud 4T adalah terlalu muda usia saat menikah, terlalu tua saat hamil, terlalu banyak anak dan terlalu rapat jarak kehamilannya.

Hamil terlalu muda dan terlalu tua sangat rentan melahirkan bayi BBLR (berat badan lahir rendah) sehingga berisiko *stunting*. Idealnya, kehamilan pertama terjadi pada usia minimal 21 tahun dan berhenti melahirkan di usia 35 tahun agar dapat merawat bayi secara optimal.

5) Merokok

Tidak kalah penting, calon pengantin wanita disarankan untuk tidak merokok atau berdekatan dengan perokok. Bila calon pasangan merokok, minta dia untuk berhenti atau menjaga jarak saat merokok. Terpapar asap rokok saat kehamilan meningkatkan risiko ibu hamil melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dan prematur sehingga pada akhirnya juga meningkatkan risiko *stunting*.

2.1.2.5.3 Pencegahan *Stunting* Bagi Calon Pengantin

Dikutip dari <https://genbest.id/articles/calon-pengantin-begini-pencegahan-stunting-sebelum-menikah>, masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK), yang begitu krusial menentukan masa depan anak, dimulai sejak proses pembuahan dalam kehamilan. Perkembangan fisik dan kognitif pada

masa 1.000 HPK terjadi begitu pesat. Ini yang membuat 1.000 HPK bisa menjadi kesempatan untuk mewujudkan masa depan anak yang sehat dan cerah serta bebas *stunting*.

berikut ini adalah langkah-langkah pencegahan *stunting* sebelum menikah:

1) Pastikan menikah di usia ideal

Langkah pencegahan *stunting* yang paling utama adalah menikah pada usia ideal. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal menikah perempuan minimal 21 tahun, dan 25 tahun untuk laki-laki. Pernikahan usia dini meningkatkan risiko kelahiran bayi *stunting*.

2) Periksa status gizi

Status gizi akan memengaruhi pertumbuhan janin saat memasuki masa kehamilan nanti. Status gizi yang kurang sebelum menikah dikhawatirkan bisa menyebabkan bayi lahir dengan BBLR (berat badan lahir rendah), sehingga meningkatkan risiko *stunting*.

3) Melakukan tes kesehatan

Lakukan tes kesehatan minimal 3 bulan sebelum menikah. Biasanya, tes kesehatan sebelum menikah meliputi pemeriksaan darah, tes penyakit menular seksual, tes TORCH (Toxoplasma gondii, Rubella, Cyto Megalo Virus, Herpes Simplex Virus), hingga tes organ reproduksi. Tujuan tes kesehatan ini untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh calon pengantin. Dengan begitu, calon pengantin bisa merencanakan kehamilan yang lebih sehat dan jauh dari risiko *stunting*.

4) Terapkan gaya hidup sehat

Langkah pencegahan *stunting* berikutnya dengan menerapkan gaya hidup sehat. Ingat, anak yang sehat berawal dari ibu yang sehat. Untuk itu, berusaha untuk mengonsumsi makanan sehat bergizi seimbang dan bervariasi setiap hari dan rutin olahraga. Jauhkan kebiasaan tidak sehat, seperti merokok. Hal itu karena paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko *stunting* pada anak.

5) Perhatikan kebutuhan asam folat, zat besi, dan kalsium

Ada beberapa nutrisi yang perlu mendapat perhatian lebih sebelum hamil, yakni asam folat, zat besi, dan kalsium. Asam folat dapat membantu mengurangi risiko cacat lahir pada otak dan sumsum tulang belakang (disebut cacat tabung saraf).

Sementara kalsium diperlukan untuk membangun tulang yang sehat. Jika tidak ada cukup kalsium, janin dapat mengambil kalsium dari tulang ibu hamil sehingga meningkatkan resiko osteoporosis kelak.

Untuk zat besi, kekurangan mineral itu dapat mengganggu kehamilan dan meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan BBLR sehingga lebih tinggi terancam *stunting*.

2.1.3 Kerangka Teoritis

2.1.3.1 Teori Rencana

Charles Berger adalah pencetus teori rencana (*theory of planning*) sebagai salah satu teori yang cukup terkenal dalam ilmu komunikasi. Teori rencana menjelaskan proses yang dilalui seseorang dalam merencanakan perilaku komunikasi mereka. Studi mengenai rencana komunikasi sebagai salah satu bidang kognitif manusia ini mendapatkan perhatian besar dari para ahli khususnya para ahli psikologi. Para ahli sebelumnya tidak terlalu memberikan perhatian pada hubungan antara rencana kognitif manusia dengan perilakunya, dan Berger berharap dapat menjembatani kekosongan ini dengan berbagai riset dan teorinya.

Berger menyatakan dalam buku Morissan bahwa rencana adalah “*hierarchical cognitive representations of goal-directed action sequences*” (representasi kognitif secara hierarkis dari urutan tindakan yang diarahkan pada tujuan). Dengan kata lain, rencana adalah gambaran mental dari sejumlah langkah yang akan ditempuh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah yang akan dilalui itu bersifat hierarkis atau berjenjang, karena tindakan

tertentu dibutuhkan lebih dahulu agar tindakan lainnya dapat dilakukan. Dengan demikian perencanaan, adalah proses memikirkan berbagai rencana tindakan.

Berkenaan dengan istilah perencanaan, Coleman Woodbury mendefinisikan perencanaan sebagai “*the process of preparing, in advance, and in a reasonably systematic fashion, recommendations for policies and courses of action, with careful attention given to their possible by-products, side effects, or spillover effects*”. Berdasarkan pengertian ini, perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup persiapan, pemilihan alternatif, serta pelaksanaan yang dilakukan secara logis dan sistematik sehingga berbagai kemungkinan yang diakibatkan dapat diprakirakan dan diantisipasi. Mencermati pengertian ini, dapat dipahami bahwa bagaimana pun baiknya perencanaan, akan selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, setiap perencana harus dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul akibat dari implementasi rencana yang dibuatnya.

Pengertian lain mengenai perencanaan disampaikan oleh John Friedmann. Dalam bukunya yang berjudul *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action* (1987), dinyatakan bahwa pengertian perencanaan selalu mengandung empat unsur utama, yaitu:

- 1) Perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi.
- 2) Perencanaan selalu berorientasi ke masa depan.
- 3) Perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan.
- 4) Perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif.

Berdasarkan keempat unsur yang disampaikan oleh Friedmann ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masa depan.

Teori rencana merupakan sesuatu yang ada sebelum adanya tindakan, berpikir tentang persoalan yang akan ada, berorientasi untuk masa yang akan datang sesuai dengan empiris. Sehingga, teori perencanaan ini sangatlah

berpengaruh dan saling keterkaitan dengan waktu yang akan datang entah jangka panjang maupun pendek dengan suatu tindakan yang telah terintegrasi. Teori rencana pada umumnya dapat mengubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju dan diperlukan adanya analisis, kebijakan, dan rancangan atau hipotesa. Dan ciri khusus dari teori perencanaan ini diadakan dengan tujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan di waktu yang akan datang melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan itu di antaranya:

- 1) Identifikasi Persoalan.
- 2) Perumusan Tujuan Umum dan Khusus.
- 3) Proyeksi Keadaan di Waktu Mendatang.
- 4) Pencarian Hipotesa yang Kemungkinan Terjadi.
- 5) Penyusunan.

Walaupun teori rencana ini disusun melalui tahap-tahap yang rapi, namun jika tidak diikuti dengan syarat yang benar dalam penyusunan rencana, hasilnya tidak akan memecahkan masalah. Syarat-syarat tersebut di antaranya:

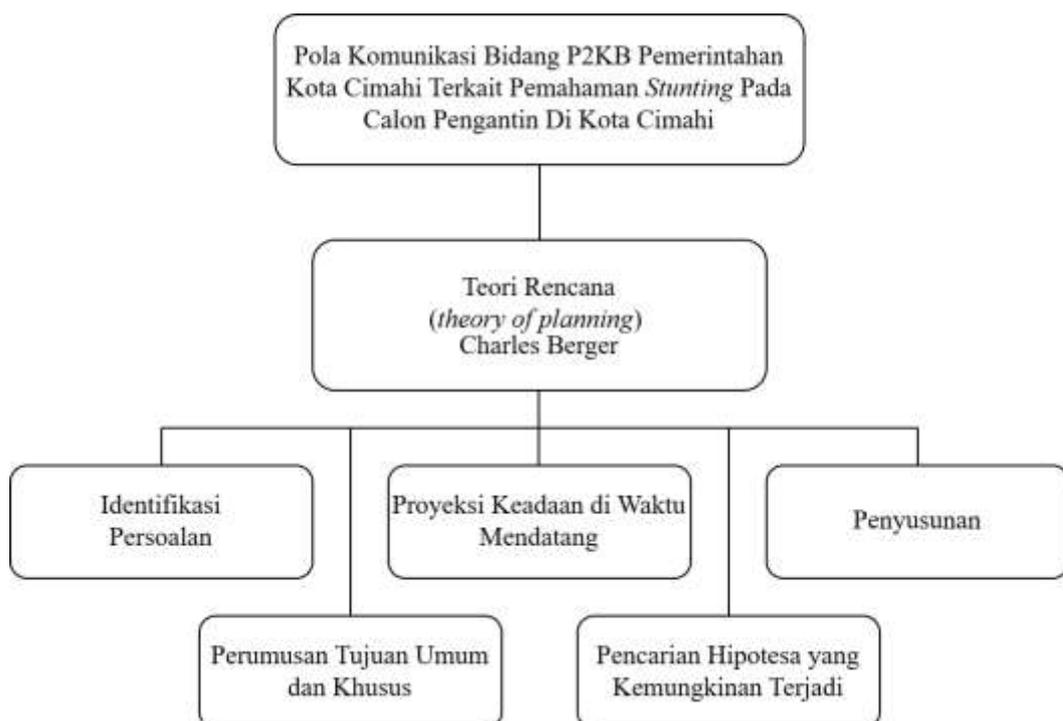
- 1) Logika masuk akal.
- 2) Realistik.
- 3) Sederhana.
- 4) Sistematis.
- 5) Obyektif.
- 6) Fleksibel atau Efektif.
- 7) Bermanfaat.
- 8) Optimasi.

Syarat-syarat tersebut diadakan agar terhindar dari kendala, dinamika tak beratur, kepentingan bersama, dan norma-norma yang telah berlaku. Dan faktor-faktornya melingkupi sumber daya alam maupun manusia, ideologi, sasaran atau target, kebijakan, metode, dan kondisi yang ada.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Widayat dan Amirullah (2002), kerangka pemikiran adalah model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan berbagai faktor-faktor masalah penting. Kerangka pemikiran juga menjadi penjelasan sementara tentang berbagai gejala yang menjadi objek penelitian. Selain itu, alur berpikir yang dipakai juga berdasarkan penelitian terdahulu, baik dari pengalaman-pengalaman empiris yang berguna untuk menyusun hipotesis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai Pola Komunikasi Bidang P2KB Pemerintahan Kota Cimahi Terkait Pemahaman *Stunting* Pada Calon Pengantin Di Kota Cimahi.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran